

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah memiliki arti luas yang mencakup semua badan-badan negara. Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan kedalam dan keluar. Kekuasaan kedalam berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu dan kekuasaan keluar berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan diakui oleh negara-negara lain.<sup>1</sup> Pemerintah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah keseluruhan dari organisasi atau lembaga pemerintah secara terstruktur mulai dari lembaga kepresidenan, kementerian dan seterusnya termasuk lembaga-lembaga lainnya dan badan-badan tingkat pusat dibawah koordinasi pemerintah pusat. Sedangkan yang dimaksud pemerintah daerah adalah pemerintah yang ada di daerah mulai dari provinsi, kabupaten, kota dibawah koordinasi kepala daerah

---

<sup>1</sup>Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Umum,2004), hal.13

dari gubernur, Bupati, walikota dan seterusnya secara terstruktur pada tingkat yang lebih rendah.<sup>2</sup>

Dengan adanya pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah maka hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut seperti halnya melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu juga Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan potensi daerah, kearifan lokal, potensi unggulan dan keanekaragaman pada daerah tersebut sehingga dampaknya juga pada kesejahteraan masyarakat pada daerah itu juga. Salah satu faktor yang perlu dijadikan perhatian bagi pemerintah daerah yaitu pada sektor ekonomi dengan berbasiskan ekonomi kreatif . Pemerintah Daerah perlu memperhatikan sektor ekonomi berbasiskan kreatifitas sehingga daerah tersebut dapat memperhatikan potensi yang ada dan diharapkan bisa menjadi jalan untuk menjadikan daerah yang mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut memiliki kreatifitas guna menuju masyarakat yang sejahtera.

Di era seperti sekarang globalisasi yang menjadi faktor utama untuk mengurangi berbagai hambatan pada perdagangan maupun ekonomi, pembangunan yang lebih mengedepankan skill, bakat, dan daya kreativitas

---

<sup>2</sup>Effendiy, *Keuangan Negara Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*, (Surabaya:Airlangga University Press, 2017), hal.8

sangatlah dibutuhkan karena hal tersebut bisa meningkatkan daya saing bangsa dan ditambah lagi dengan adanya persaingan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang membuat persaingan antar warga semakin terbuka. Adanya hal ini menjadi tugas bagi pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Daerah sendiri agar bisa menyiapkan masyarakatnya agar mampu bersaing di era seperti sekarang ini.

Ekonomi kreatif sendiri melibatkan para creator dan pencetus ide. Manusia diharuskan mampu mewujudkan dari ide dan kreativitas yang dimiliki. Sebagai wujud dari reaksi fenomena yang terjadi pada bidang ekonomi tersebut maka munculah ekonomi kreatif sebagai salah satu alternatif pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Kreatif sendiri adalah era ekonomi baru yang memusatkan fokusnya pada kreativitas dan informasi. Modal utama yang diperlukan dalam ekonomi kreatif yaitu wawasan yang luas dan ide yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Dari dua faktor tersebutlah yang menjadi modal utama yang digunakan oleh manusia untuk menghadapi era ekonomi kreatif saat ini.<sup>3</sup>

Saat ini Ekonomi Kreatif mulai tumbuh dan berkembang menjadi sektor ekonomi yang mempunyai peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Diketahui pada tahun 2014, ekonomi kreatif diperkirakan telah berkontribusi sebesar 7,1% terhadap PDB nasional dengan

---

<sup>3</sup> Ghalib Aghfa Polnaya, Darwanto. *Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada UKM Ekonomi Kreatif Batik Bakaran di Pati, Jawa Tengah*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol.22 No.1 Maret.2015.hal.4.

menyediakan 12 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi pada devisa negara sebesar 5,8%. Dalam lima tahun kedepan ini ditargetkan ekonomi kreatif memiliki kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 12% dengan 13 juta tenaga kerja dan kontribusi ekspor mencapai 10%. Dengan mencermati perkembangan ekonomi kreatif yang dipaparkan maka perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia perlu diintergrasikan kedalam sistem perekonomian Indonesia secara utuh sehingga Indonesia mempunyai ketahanan ekonomi sekaligus budaya.<sup>4</sup>

Ekonomi Kreatif kini semakin banyak yang meminati dengan seiring perkembangan informasi dan teknologi. Ekonomi Kreatif menjadi sebuah denyut nadi bagi perekonomian yang memiliki hubungan erat dengan bidang budaya kewirausahaan yang diprediksi akan menjadi trend ekonomi dunia termasuk Indonesia yang ikut serta dalam Masyarakat Ekonomi asean (MEA). Pada saat ini Pemerintah mulai melirik pada Industri Kecil dan Menengah sebagai roda penggerak perekonomian yang nantinya akan terus berputar.<sup>5</sup>

Industri kreatif merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan oleh ekonomi kreatif itu sendiri. Maksud dari tidak bisa terpisahkan dikarenakan ekonomi kreatif bisa dikatakan sebagai sumber dari adanya sistem ekonomi berupa penawaran dan permintaan pada semua kegiatan

---

<sup>4</sup>Arina Romarina, *Economic Resilience Industri Kreatif Guna Menghadapai Globalisasi Dalam rangka ketahanan Nasional*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol.15, No.1, Februari 2016, hal.38-39

<sup>5</sup>M. Amir. *Kebijakan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Kerajinan Unggulan dalam Upaya Mengangkat Kearifan Lokal Kabupaten Tuban*,. *Jurnal Cakrawala*, Vol.11 No.2 Desember 2017. hal.158.

ekonomi yang digerakan oleh sektor industri yang disebut dengan industri kreatif.

Pemerintah memahami jika Ekonomi Kreatif yang berfokus pada suatu penciptaan suatu barang dan jasa dengan mengutamakan skill, bakat, dan daya kreativitas yang tinggi sebagai kekayaan intelektual merupakan harapan bagi ekonomi Indonesia yang bertujuan agar dapat bangkit, bersaing, dan bisa meraih keunggulan dalam ekonomi global. Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia merupakan wujud optimis serta luapan aspirasi dari masyarakat untuk mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yaitu menjadi negara yang maju. Hal tersebut bisa terbuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan ekonomi Kreatif (BEK).<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 20 pada Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Untuk mengelola ekonomi kreatif dan potensinya sendiri diperlukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan Ekonomi Kreatif dapat memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Ekonomi kreatif itu memanfaatkan cadangan sumber daya yang bukan terbarukan saja tapi lebih tak terbatas seperti ide, gagasan, bakat

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif.

atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti era industri. Sekarang era kreatif lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak bisa bersaing dipasar global kalau hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.

Ekonomi kreatif sendiri memiliki 16 klasifikasi antara lain seperti: aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi dan visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.<sup>7</sup>

Peningkatan Ekonomi Kreatif juga dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Mengingat Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan julukan sebagai Kota Marmer. Hal ini dikarenakan Tulungagung memiliki kekayaan alam yang melimpah dan didukung oleh kekayaan seni budaya dan kearifan lokal masyarakatnya membuat Pemerintah Daerah ingin meningkatkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya potensi yang ada baik potensi industri, potensi ekspor dan potensi unggulan yang dimiliki Tulungagung

---

<sup>7</sup>Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal.134-135

apabila terus dikembangkan maka akan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Tulungagung.

Untuk meningkatkan ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung ada 12 subsektor, namun yang sudah mendapatkan binaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung ada 7 subsektor dan dari ketujuh subsektor tersebut yang memiliki perkembangan yang paling bagus ada 4 subsektor. 12 subsektor yang dimaksud yang dikembangkan di Tulungagung yaitu kriya, *fashion*, seni rupa, seni pertunjukan, kuliner, arsitek, televisi, editing video, desain interior, desain produk, fotografi, musik. 7 subsektor yang sudah mendapatkan binaan dari pemerintah yaitu pertunjukan, kriya, *fashion*, kuliner, musik, seni rupa dan desain produk dan dari ketujuh subsektor yang memiliki perkembangan paling bagus yaitu sektor seni pertunjukan, kriya, *fashion* dan kuliner untuk kurangnya semua ini masih dalam proses menuju 16 subsektor.

Dengan adanya 12 subsektor ini menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi kreatif itu sendiri. Pemerintah saat ini sangat mendukung dengan keberadaan ekonomi kreatif, karena dengan adanya ekonomi kreatif ini membantumkan memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan seperti memberikan peningkatan lapangan kerja, sumbangan terhadap PBD, menciptakan iklim bisnis, menciptakan inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan bagi daerah dan dapat memberikan dampak sosial yang positif seperti peningkatan kualitas hidup.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif di**  
**Tulungagung Tahun 2016-2019**

<b>Tahun</b>			
<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
20 orang	41 orang	77 orang	109 orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung

Dari tabel diatas bisa kita ketahui bahwa jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa menjadi acuan bahwa ekonomi kreatif di Tulungagung terus mengalami perkembangan dengan munculnya pelaku ekonomi kreatif. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki usaha disektor ekonomi kreatif. Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung selalu memberikan dukungannya dalam bentuk pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif, sehingga ekonomi kreatif semakin berkembang.

Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada beberapa kendala terkait dengan adanya pengembangan pada Ekonomi Kreatif. Kendala tersebut tidak hanya pada industrinya saja akan tetapi juga pada Sumber Daya Manusia (SDM) kendala yang dihadapi yaitu mulai dari kurangnya daya tarik industri dikalangan masyarakat, model bisnis industri kreatif yang masih belum matang serta resiko usaha yang harus dihadapi dari industri kreatif. Bahkan teknologi juga masih menjadi kendala, hal ini



dikarenakan infrastuktur pada internet yang masih belum memadai dan dijangkau di seluruh Indonesia. Selain itu kendala yang dihadapi dilapangan yaitu pelaku usaha disektor ekonomi kreatif masih minim dalam hal mengakses pembiayaan sehingga pelaku usaha sulit dalam modal yang akan digunakannya. Di Tulungagung pun permasalahan yang terjadi dikalangan pelaku usaha kebanyakan yaitu masih banyaknya pelaku usaha yang minim akan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola usahanya seperti kurangnya ketrampilan untuk mendesain produk, dan kurangnya ketidaktahuan akan Iptek. Selain itu kurangnya modal untuk mengembangkan usahanya juga menjadi faktor yang paling utama. Kebanyakan para pelaku usaha hanya mengandalkan kemampuan ala kadarnya dan untuk memasarkan produk mereka juga masih minim sehingga hal ini menjadi tugas bagi pemerintah daerah Tulungagung.

Harapan Pemerintah Daerah dengan mengusung ekonomi kreatif ini maka pelaku dari ekonomi kreatif ini diharapkan mampu atau bisa bersaing dengan pelaku yang lain dengan menggunakan ide, ketrampilan dan kreativitas yang ada. Dalam hal ini yang dilakukan pemerintah daerah agar pelaku usaha memiliki ketrampilan maka pemerintah daerah selalu memberikan pelatihan, pembinaan dan mengajak para pelaku untuk ikut mempromosikan produk mereka dengan mengikuti pameran. Bagi pelaku usaha yang masih mengalami kurangnya akses permodalan, maka pemerintah membantu untuk mengatasi akses permodalan mereka selain itu yang tidak kalah penting ikut membantu mensosialisasikan dan

memberikan perizinan yang resmi bagi produk mereka. Sehingga produk mereka itu memiliki legalitas hukum resmi. Program-program yang dicanangkan untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang dilakukan pemerintah daerah Tulungagung yaitu: Mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain, dan iptek, Mengembangkan ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya dan memberikan fasilitas bagi para pelaku ekonomi kreatif. Dengan adanya program ini diharapkan bisa menjadikan masyarakat Tulungagung khususnya pelaku usaha dapat bersaing dalam hal perekonomian yang semakin maju khususnya dengan kaitannya ekonomi kreatif.

Peran Pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi Kreatif menjadi perhatian untuk dikaji mengingat Kabupaten Tulungagung merupakan kota yang menyimpan banyak potensi yang ada untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi. Pemerintah Daerah dalam hal ini dituntut untuk bisa membentuk pelaku ekonomi kreatif lebih banyak lagi dan mengubah pola pikir masyarakat agar nantinya bisa mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas yang bukan hanya terbarukan saja namun tak terbatas lebih mengedepankan ide, ketrampilan dan kreativitas.

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang terkait dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang yang ada diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung”
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung Peningkatan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Hasil dari pengembangan Ekonomi Kreatif di kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung peningkatan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui hasil dari pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung.

## **D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada:

1. Peran Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai subjek dalam meningkatkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung.

## 2. Batasan Masalah:

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini agar pembahasan lebih fokus adalah sebagai berikut:

- a. Objek penelitian dalam meningkatkan ekonomi kreatif yaitu hanya 4 subsektor walaupun di Tulungagung terdapat 12 subsektor ekonomi kreatif dan dari 12 subsektor ada 7 subsektor yang sudah mendapatkan binaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung dan dari 7 subsektor ada 4 subsektor yang memiliki perkembangan sangat bagus.
- b. Informan dalam penelitian ini adalah mereka para pelaku usaha yang termasuk pada bidang 4 subsektor tersebut. 4 subsektor tersebut yaitu seni pertunjukan, kriya, kuliner dan *fashion*.

## **E. Manfaat Penelitian**

**Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Peran pemerintah Untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan sebagai literatur bagi civitas akademika IAIN Tulungagung maupun institusi lain.

### **2. Manfaat praktis**

#### a. Bagi Akademik

Hasil Penelitian ini menjadi dokumentasi akademik yang berguna sebagai bahan acuan civitas akademik IAIN Tulungagung.

b. Bagi Pihak Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau saran kepada instansi pemerintah agar lebih baik lagi dalam meningkatkan ekonomi kreatif.

c. Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk pelaku ekonomi kreatif mengembangkan usahanya dan bisa bersaing dengan pelaku ekonomi kreatif lainnya.

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih lanjut.

## F. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan “Peran Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung “ diperlukan penjelasan dan uraian singkat sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Konseptual

- a. Peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban.<sup>8</sup>
- b. Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah

---

<sup>8</sup>Arco Musaddad, *Anangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*, (Sulawesi Barat:Gerbang Visual,2018), hal.8

agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.<sup>9</sup>

- c. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru dimana penopang utamanya adalah informasi dan kreativitas dimana ide dan stock knowledge dari sumber daya manusia (SDM) yang menjadi faktor produksi yang utama dalam kegiatan ekonomi.<sup>10</sup>

## 2. Operasional

Berdasarkan judul diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Kabupaten Tulungagung terutama pada 4 subsektor yang sudah dikembangkan tersebut.

## G. Sistematika Skripsi

**BAB 1 PENDAHULUAN:** Dalam hal ini berisi mengenai beberapa alasan teoritis atau alasan praktis mengenai judul yang akan diteliti. Diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian dan definisi operasional.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA:** Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian teori, peneliti terdahulu dan kerangka berfikir. Kajian teori dalam

---

<sup>9</sup>Hanif Nurcholis, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, (Jakarta:Grasindo, 2009),hal.3

<sup>10</sup>Nely Meriana,*Ekonomi Kreatif dan Potensi Besar Bagi UKM*,( Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, 2017), hal.12

penelitian ini terdapat beberapa istilah yaitu Peran, Pemerintah Daerah dan Ekonomi Kreatif.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Dalam bab ini mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN:** Dalam bab ini berisikan tentang uraian paparan data yang disajikan sesuai dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan hasil dari analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan baik dari hasil observasi, wawancara ataupun dari hasil dokumen-dokumen yang bersangkutan.

**BAB V PEMBAHASAN:** Dalam bab ini memuat keterkaitan tentang hasil penelitian yang dilakukan berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan dilakukan dengan teori yang sudah dipaparkan pada bab II agar menghasilkan kesimpulan yang akurat.

**BAB VI PENUTUP:** Dalam bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban dari permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.